

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tugas Skripsi)

Oleh

LAUDYA VELOVIA GUSTIRA

NPM 2456041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan tolak ukur sehingga mempermudah peneliti dalam proses penyusunan juga menyelesaikan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui apakah penelitian yang serupa telah diteliti. Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk memperkuat kerangka teoretis dalam penelitian ini.

Haryadi (2024) meneliti peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi publik melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial mampu memfasilitasi komunikasi interaktif, mempercepat penyebaran informasi, serta meningkatkan partisipasi publik. Program *Si Cepat Mesi* menjadi bukti inovasi pelayanan publik yang efisien, meski masih terkendala literasi digital dan infrastruktur (Haryadi, 2024).

Penelitian lain oleh Mauni (2025) membahas peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Jawa Timur. Dengan studi literatur, ditemukan bahwa e-government berperan strategis dalam memperkuat *good governance* melalui peningkatan akses informasi, partisipasi publik, efisiensi, dan pencegahan korupsi. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan infrastruktur, resistensi aparatur, serta rendahnya keterampilan digital (Mauni, 2025).

Sementara itu, Nirwana (2023) menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh media online terhadap kepercayaan masyarakat di Dinas Dukcapil Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan sebesar 93%, yang menegaskan efektivitas media online dalam memperkuat legitimasi pemerintah (Nirwana, 2023).

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu menegaskan pentingnya media sosial, teknologi informasi, dan media online dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Namun, keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan resistensi birokrasi tetap menjadi tantangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada pengaruh media sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan Bupati Kabupaten Pringsewu dalam konteks yang lebih partisipatif.

Tabel 2. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Agus Tri Haryadi (2024)	Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik	Sama-sama meneliti media sosial terkait transparansi dan akuntabilitas	Objek penelitian umum pada administrasi publik, bukan kepala daerah	Media sosial mempercepat informasi, meningkatkan partisipasi, dan mendukung akuntabilitas; kendala literasi digital & infrastruktur.
Chintya Mauni (2025)	Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur	Sama-sama membahas teknologi digital untuk transparansi & akuntabilitas	Fokus pada e-government dan TI, bukan media sosial	Teknologi informasi meningkatkan akses, efisiensi, dan pencegahan korupsi; kendala infrastruktur & resistensi aparatur.
Nirwana (2023)	Pengaruh Penggunaan Media Online dalam Kegiatan Pemerintahan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Studi pada Dinas Dukcapil Luwu Utara)	Sama-sama mengkaji media online dalam interaksi pemerintah-masyarakat	Fokus pada kepercayaan masyarakat, bukan transparansi & akuntabilitas	Media online berpengaruh signifikan (93%) terhadap kepercayaan masyarakat.

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Grand Theory: Teori Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas dan proses yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga publik dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Utami, 2023). Administrasi publik mencakup beragam fungsi utama, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi (Widiastuti, 2025).

Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan efektif, efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi landasan penting dalam praktik administrasi publik (Djafar, 2024). Selain itu, bidang ini juga meliputi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Lebih dari sekadar aktivitas administratif, administrasi publik memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, administrasi publik modern tidak lagi hanya dipandang sebagai mekanisme birokrasi yang berorientasi pada prosedur, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Dwiyanto, 2021). Teori Administrasi Publik memberikan kerangka konseptual bahwa pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan good governance di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang menuntut adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu dapat dipahami sebagai bagian dari praktik administrasi publik kontemporer. Media sosial menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat, membuka akses informasi kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, Teori Administrasi Publik menegaskan bahwa administrasi publik di era digital harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

2.2.2 Middle Theory: *Good Governance*

Middle theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Governance*. Konsep *good governance* menekankan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan publik. Prinsip ini menjadi salah satu landasan utama reformasi birokrasi di Indonesia, di mana keterbukaan informasi dan akuntabilitas dipandang sebagai tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2021).

Good Government Governance (GGG) merupakan suatu sistem atau mekanisme yang dirancang agar para penyelenggara negara dapat menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Sari et al., 2024). *Good governance* juga didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif terhadap masyarakat, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan publik (Widiastuti, 2025). UNDP menguraikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari sembilan aspek, yaitu transparansi, partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), orientasi konsensus, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (LAN & BPKP, 2000).

Dengan demikian, *good governance* sebagai middle theory menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu dapat dipandang sebagai praktik nyata implementasi prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan daerah.

2.2.3 Applied Theory: Governansi Digital

Governansi Digital sebagai kerangka untuk menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Governansi Digital adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pejabat public (Rusmanto et al., 2025).

Dalam konteks administrasi publik, media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat (Sentanu, 2024). Penerapan Governansi Digital memungkinkan Bupati Kabupaten Pringsewu untuk secara cepat menyampaikan informasi kebijakan, menerima masukan publik, dan menampung aspirasi warga, sehingga tercipta transparansi informasi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.

Applied theory ini diterapkan dengan menganalisis konten media sosial resmi Bupati, interaksi masyarakat melalui komentar atau tanggapan, serta persepsi warga terhadap keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah. Dengan menggunakan kerangka Governansi Digital, penelitian ini dapat menilai sejauh mana media sosial berperan sebagai alat peningkatan good governance, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

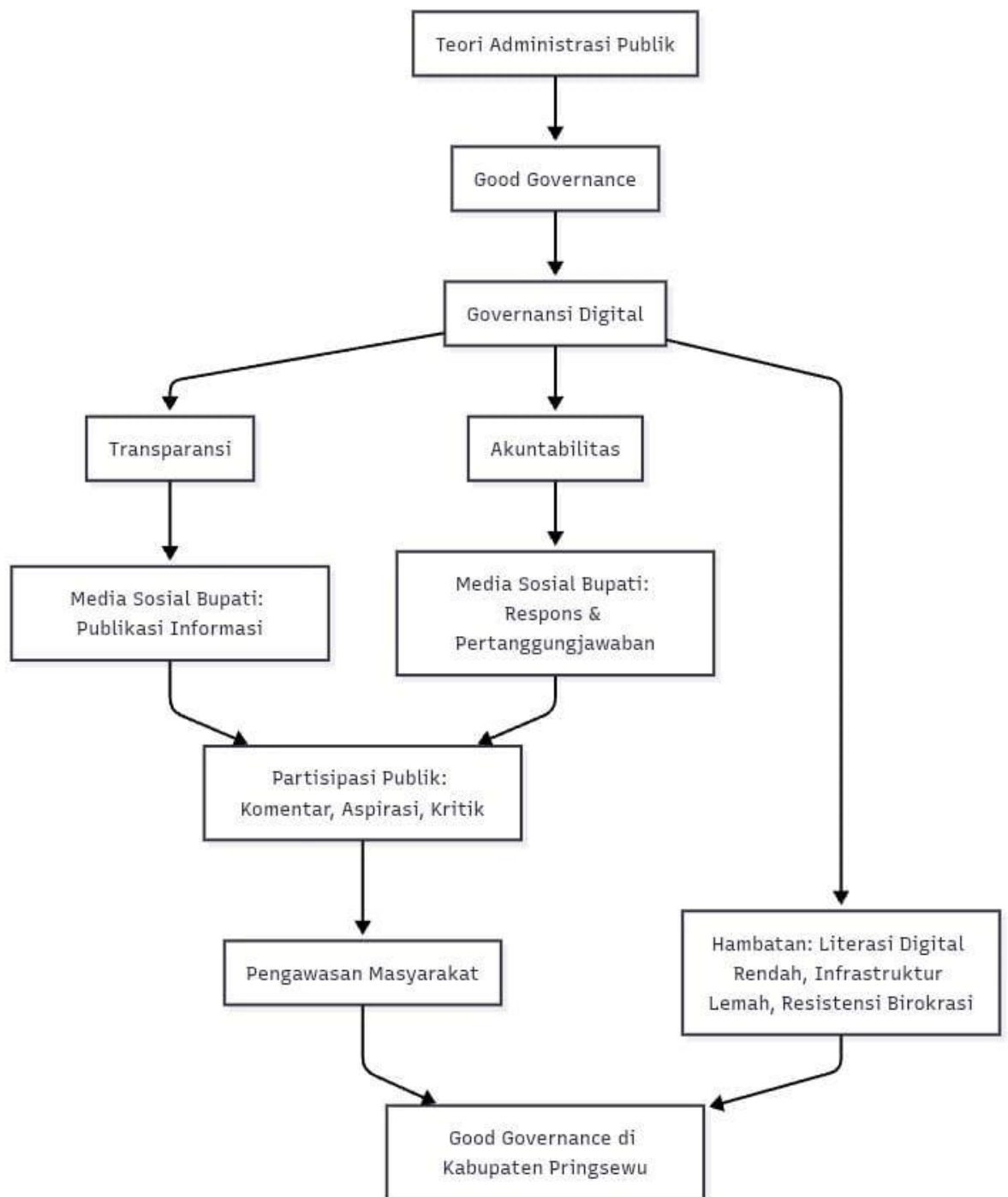
Dengan demikian, Governansi Digital menjadi lensa teoretis yang menghubungkan praktik penggunaan media sosial dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern, sehingga temuan penelitian dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pringsewu.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Media sosial yang digunakan oleh Bupati Kabupaten Pringsewu menjadi sarana publikasi informasi mengenai program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah. Proses ini menciptakan transparansi karena masyarakat memperoleh akses yang lebih luas dan cepat terhadap informasi publik.

Selain itu, media sosial membuka ruang partisipasi dan interaksi publik berupa komentar, kritik, maupun aspirasi. Partisipasi ini mendorong adanya pengawasan masyarakat, yang kemudian menuntut pemerintah memberikan respons berupa klarifikasi, tindak lanjut, atau pelaporan. Proses ini mencerminkan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas yang lahir dari pemanfaatan media sosial pada akhirnya bermuara pada terwujudnya good governance.

Namun, efektivitas media sosial tidak terlepas dari sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi birokrasi, hingga adanya moderasi atau sensor informasi. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi melemahkan peran media sosial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana media sosial dimanfaatkan, bagaimana masyarakat merespons, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban publik dijalankan di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 3. Kerangka Pikir Hasil olah peneliti, 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, F. (2024). *Teori administrasi publik: Pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Haryadi, A. T. (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3342-3349.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lan, 2.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 104-115.
- Nirwana, N. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ONLINE DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Study pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Utara) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Rusmanto, W., Permatasari, A., & Sopandi, E. (2025). *Governansi digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Sari, S., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2024). *Pengaruh implementasi good government governance pada kualitas pelayanan publik (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia)*. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2).
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). *Dinamika governance: Teori, praktek, dan implikasi kebijakan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.
- Widiastuti, I. (2025). *Teori administrasi publik*. ResearchGate.